RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

PERWA NO.53 , BD. 2025 / NO.54, PEMKOT PTK: 102 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur sebagai penjabaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025–2029, sistematika penyusunan dokumen Renstra, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah. Renstra memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kecamatan Pontianak Timur. Dengan demikian, Peraturan Wali Kota ini ditetapkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Pontianak Tahun 2025–2029 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025; Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2021.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 September Tahun 2025.

- Penjelasan: - 102 hlm.